

No. Daftar FPIPS :

**OTONOMI DAERAH ACEH:
Sejarah dan Latar belakangnya (1970-2005)**

SKRIPSI

*diajukan untuk memenuhi sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada*

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

**ZULFAN HADI
1507059**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**

**OTONOMI DAERAH ACEH
SEJARAH DAN LATAR BELAKANGNYA (1970-2005)**

oleh
Zulfan Hadi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan
Program Stuid Pendidikan Sejarah
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan
Indonesia

© Zulfan Hadi 2021

Universitas Pendidikan Indonesia Januari 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak
ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

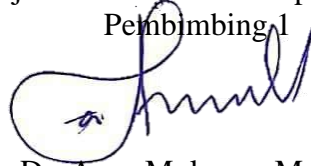
ZULFAN HADI

(1507059)

**OTONOMI DAERAH ACEH
SEJARAH DAN LATAR BELAKANGNYA
(1970-2005)**

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

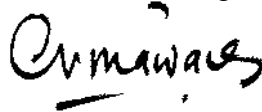
Pembimbing I



Dr. Agus Mulyana, M.Hum

NIP. 19660808 199103 1 002

Pembimbing II



Dr. Wawan Darmawan, S.Pd, M.Hum

NIP. 19710101 199903 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Departement Pendidikan Sejarah



Dra. Murdiah Winarti, M.Hum

NIP. 19641204 199001 2 002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Otonomi Daerah Aceh : Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-2005)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 2 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



Zulfan Hadi
NIM. 1507059

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, tuhan pencipta alam beserta isinya yang telah memberikan rahmat, hidayah serta bimbingan-Nya. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasullullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang InsyaAllah setia hingga akhir zaman. Alhamdulillahrabbi'l'alamin skripsi dengan judul “Otonomi Daerah Aceh : Sejarah dan Latar Belakangnya (1970-2005)” telah selesai disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Bapak Dr. Agus Mulyana, M. Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Wawan Darmawan, S.Pd, M. Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan skripsi yang telah disusun ini dapat menjadi awal dari kontribusi penulis terhadap pendidikan di Indonesia dan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis mengaharapkan pula kritikan yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik untuk ke depannya.

“Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup.” – Gloria Steinem.

Wallahul Muwaffiq Ila

Aqwamith Tharieq

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung, 2 Juni 2021



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada Bapak Dr. Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dr. Murdiah Winarti, M.Hum. selaku Ketua program studi Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, yang telah banyak memberikan pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf program studi Departemen Pendidikan Sejarah yang senantiasa sabar mendidik dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis
5. Ayah Mathandi dan Ibu Jamaliah terimakasih atas semua yang telah kalian berikan, motivasi, doa serta kasih sayang yang begitu berarti bagi penulis selama menyelesaikan studi ini.
6. Kepada Dentiani Sarah Sobirin yang selalu membantu serta menyemangati penulis, Terima kasih atas dedikasinya.
7. Teman-teman peneliti yakni, Isti Uga, Mitha Nurfilani, Anisya Rachmiati, Terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
8. Sahabat dalam berorganisasi dan berproses sedari mahasiswa baru mengenal dunia kampus yang tergabung dalam Segi Lima, yakni Fiknul Anam, Sugih Rachmat, Andhika Aditya, dan Andre Akbar.
9. Senior dan sahabat-sahabat, Rizal Hamzah Saragih, Tito Wardani, Sholahudin Fajar, Acep Nurzamal, Ari Kamal, Reza Omo, Ahmad Syaiful Anwar, Anggi Muhammad, Tyas Azis, dan Renno Wardhana yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis
10. Teman-teman seataap, Dolly, Risal, Adnan, Rifki, Syahrin, Rivai, dan Luthfi yang selalu memotivasi penulis.
11. Teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2015, teman-teman KKN Desa Pagerwangi 2018, teman-teman PPL SMA XIX-1 Kartika Bandung, teman-teman Senat FPIPS UPI Periode 2017-2018 serta teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu terimakasih atas segala yang telah kalian berikan kepada penulis.

ABSTRAK

OTONOMI DAERAH ACEH Sejarah dan Latar Belakangnya: 1970-2005

Zulfan Hadi (1507059). Skripsi Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

Penelitian ini adalah mengenai Sejarah dan Latar Belakang daerah Aceh mendapatkan Otonomi Daerah dimulai dari tahun 1970-2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah dan Latar belakang Aceh dalam mendapatkan otonomi daerah serta upaya Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Keutuhan NKRI seperti diketahui terdapat gerakan di Aceh sendiri, yang dikenal dengan GAM ingin mendirikan negara Aceh merdeka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi historis, Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan bahwasanya, Sejarah dan latar belakang otonomi daerah Aceh mengalami fase yang sangat panjang, dinamika yang dilalui sudah terjadi sejak zaman orde lama dimulai dengan peristiwa DII/TII hingga perlawanan Gerakan Aceh Merdeka, faktor kebijakan pemerintah menjadi alasan yang mendasar terjadinya banyak gejolak di Aceh, banyaknya ketimpangan antara daerah dan pusat dalam hal pembangunan serta semakin merajalelanya kemiskinan yang pada kenyataannya hasil pembangunan infrastruktur dan sebagainya Sebagian besar berasal dari hasil bumi daerah. Pergolakan di Aceh hingga menghasilkan Otonomi daerah dilakukan oleh GAM, konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah pusat memakan banyak korban, sehingga upaya perjanjian perdamaian dilakukan, atau juga lebih dikenal dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan salah satunya mengenai pemerintahan Aceh yang bersangkutan dengan otonomi daerah. Hal ini menjadikan Aceh berbeda dengan daerah di bagian Indonesia lainnya, dimana salah satunya terdapat Partai Lokal serta adanya Polisi Syariat Islam.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Aceh, GAM, MoU Helsinki, Pemerintahan Aceh.

ABSTRACT
ACEH REGIONAL AUTONOMY
History and Background: 1970-2005

Zulfan Hadi (1507059). Undergraduate Thesis from Department of History Education, Faculty of Social Science Education, Indonesia University of Education

This research is about the history and background of the Aceh region to obtain regional autonomy starting from 1970-2005. This study aims to determine the history and background of Aceh in gaining regional autonomy and the efforts of the Indonesian Government in maintaining the integrity of the Republic of Indonesia as it is known that there is a movement in Aceh itself, known as GAM who wants to establish an independent Aceh state. The methodology used in this research is a historical methodology. This research has resulted in several conclusions that, the history and background of Aceh's regional autonomy experienced a very long phase, the dynamics that have been passed have occurred since the old order era, starting with the DII / TII incident to the rebellion of the Free Aceh Movement. Government policy factors are the underlying reasons for the many turmoil in Aceh, the large disparities between the regions and the central government in terms of development and the increasing poverty, which in fact is the result of infrastructure development and so on. Most of it comes from regional crops. The upheaval in Aceh that resulted in regional autonomy was carried out by GAM, the prolonged conflict with the central government took many victims, so that efforts to make a peace agreement, or also better known as the Memorandum of Understanding (MoU) were implemented in Helsinki, Finland. The agreement resulted in a peaceful agreement between the two parties and one of them was regarding the Aceh government concerned with regional autonomy. This makes Aceh different from other regions in Indonesia, where one of them is the Local Party and the Islamic Sharia Police.

Keywords: Regional Autonomy, Aceh, GAM, MoU Helsinki, Aceh Government

DAFTAR ISI

Lembar Hak Cipta	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Struktur Organisasi Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Otonomi Daerah.....	11
2.2 Teori Konflik.....	17
2.3 Pemerintahan.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	32
2.4.1 Jurnal.....	32
2.4.2 Skripsi.....	35
2.4.3 Tesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Persiapan Penelitian.....	42
3.2.1 Pengajuan Penelitian.....	42
3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian.....	43
3.2.3 Proses Bimbingan.....	44
3.3 Pelaksanaan Penelitian.....	45
3.3.1 Heuristik.....	45
3.3.2 Kritik Sumber.....	47
3.3.3 Interpretasi.....	52
3.3.4 Historiografi.....	54
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Latar Belakang Berlakunya Otonomi Daerah di Aceh.....	56
4.1.1 Adanya Gerakan Aceh Merdeka.....	60
4.1.2 Perkembangan Gerakan Aceh Merdeka.....	67
4.2 Proses Pemberian Otonomi Daerah Kepada Aceh.....	72
4.2.1 Langkah Pemerintah Pusat Menyelesaikan Konflik Aceh.....	75

4.2.2	Perundingan dan Kesepakatan Damai.....	86
4.3	Aceh Setelah Mendapatkan Otonomi Daerah	99
4.3.1	Adanya Partai Lokal.....	102
4.3.2	Lembaga Wali Nanggroe (Wali Negara)	107
4.3.3	Penerapan Syariat Islam.....	109
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI		113
5.2	Simpulan	113
5.3	Rekomendasi.....	117
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN.....		125

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim. (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aguswandi dan Large J. (2008). *Rekonfigurasi Politik: Proses Damai Aceh*. London: Conclution Resources.
- Ansori, H. M. (2017). *From Insurgency to Bureaucracy: Free Aceh Movement, Aceh Party and the New Face of Conflict*.
- Anggraini, J. (2011). Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18. 320-335.
- Aspinall, Edward. (2009). *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh Indonesia*. California: Stanford University Press.
- Bahri. S. (2012). Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12. 359-367.
- Baihaqi. (2014). *Kedudukan Wali Nanggroe Di Aceh*. Jurnal Ilmiah Peuraden. Vol. 11 No. 01.
- Bappeda Aceh, Aceh dalam Angka edisi 2013
<https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html>
(di akses pada tanggal 18 April 2019 pukul 18.35)
<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=11&wilayah=Aceh> (di akses pada tanggal 18 April 2019 pukul 19.21).
- Beilharz, Peter, Teori-Teori Sosial. 2003. *Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Benda, Julien. (1997). *Pengkhianatan Kaum Intelektual*. Jakarta: Gramedia.
- Bertarand, J. (2012). *Nasionalisme Dan Konflik Etnis Di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.
- Boland, B.J. (1971). *The Struggle of Islam In Modern Indonesia*. Hague: KITLV.
- Budiarjo, Miriam. (1993). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, H. (2016). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. *Jurnal Penelitian*

- Politik*, 9. 1-22.
- Coser, L. (1967). *Continuities in the Study of Social Conflict*. Free Press. New York.
- Dahrendorf, Ralf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. London: Routledge; First Pub. 1957.
- Dakidhae, Daniel. (2001). *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua*. Jakarta: YAPPIKA.
- Djalil, M. (2009). *Hasan Tiro Berontak: Antara Alasan Historis, Yuridis, Dan Realitas Sosial*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.
- Djohan, D. (1990). *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal (Cet.Pertama)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Djumala, D. (2013). *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatah, E. (1998). *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2013). *What Is Governance?*. Washington: Center for Global Development.
- Figo, Z. (2014). *Eksistensi Partai Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)*. Skripsi: UIN Syarif Hidaytullah.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., dan Donnelly, James H. (2000). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. Boston: Irwin McGraw-Hill.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Depok: UI Press.
- Hasan, Effendi & Zulfiadi. (2009). *Pemikiran Politik Hasan Muhammad di Tiro Tentang Konsepsi Bangsa Negara*. Banda Aceh: Academia.
- Habib, M. (2008). *Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haris, S. (1999). *Indonesia Di Ambang Perpecahan?: Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya dan Timor-timur*, Jakarta: Erlangga.

- Hanafi, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendratno, Edie.T. (2009). *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Penerbit Ghalia Ilmu.
- Hery Susanto dkk. (2003). *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Millenium Publisher, Jakarta.
- Hoessein, B. (2001). *Transparansi Pemerintah: Mencari Format dan Konsep Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. *Forum Inovasi*.
- Husaini, H. (2016). *Dari Gunung Halimun Ke Swedia*, Jakarta: Batavia Publising.
- Husain, F. (2007). *To See The Unseen*. Jakarta: Health and Hospital Indonesia.
- Ibrahim, M. (1981). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Depdikbud.
- Isa Sulaiman. (2000). *Aceh Merdeka; Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ishak, Otto Syamsudin. (2008). *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Ishak, Otto Syamsuddin. (2011), *Keindonesiaan Persatuan Yang Terhenti*. Prisma. Vol 30.
- Ismaun. (2005). *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung. Historia Utama Press
- Iqbal, M. (2020). *Perkembangan Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh*. Legitimasi. Vol. 9 No. 1.
- Jalil. H. (2007). *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. *Jurnal Equality*, 12, 1-12.
- Jemadu, Aleksius. (2006), *“Proses Peacebuilding di Aceh: Dari MoU Helsinki Menuju Implementasi Undang-undang tentang Pemerintah Aceh”* dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3, No. 4 h. 527-551.
- Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang. (1990). *Teori Sosiologi Klasik Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirjo, S. (1993). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. (2011). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan*

- Abnormal Itu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartiwa, A. Nugraha. (2012). *Mengelola Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Lepsindo.
- Kahin, George McT (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kirsten. E, S. (2004). *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organization*. Washington: East West Center.
- Lan Thung, J, dkk. (2005). *Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh Dalam Proses Rekonstruksi & Rekonsiliasi*, Jakarta: LIPI.
- Lombard, Denys. (1986). *Kerajaan Aceh*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, M, S. (1983). *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintrah Daerah*. Bandung.
- Makin, Al. (2016). *Identitas Ke-Aceh-an dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat, dan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Malahayati. (2015). *Otonomi Khusus Aceh dan Papua*. Skripsi: Tidak diterbitkan.
- Martono. N. (2017). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Postkolonial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, N, Warsidi, A. (2011). *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- Missbach, A. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.
- Mudjiharto. (2020). *Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MOU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Aceh*. Yogyakarta: Jurnal Politik Profetik. No 1 Vol. 8
- Munawar A Djalil. (2009). *Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher.
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Politik Profetik*. 1 (1).
- Nasikun. (1984). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Nazaruddin, S. (2002). *Mengapa Indonesia Harus Menjadi Negara Federasi*,

- Jakarta: UI Press.
- Nurhasim, Moch., dkk. (2003). *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI.
- Nurhasim, Moch, dkk. (2003). *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Nurhasim, Moch. (2008). *Konflik Dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamudji, S. (1984). *Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah Didalam Sistem Administras Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. (1997). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.1
- Poloma, M. M (1994). *Sosiologi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ralf, D. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali Press.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Pasal 13.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahah Aceh*, Pasal 36.
- Ritzer, G dan Goodman D. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Rohayati. (2007). *Langkah-Langkah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Dalam Penyelesain Konflik Aceh*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Safitri, S. (2016). SEJARAH PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *JURNAL CRIKSETRA*. 5(9). Hlm. 79 – 83.
- Sahrudin. (2014). *Partai Aceh Dalam Transisi Demokrasi di Aceh*. Jurnal Politik. Vol 10 No. 01.
- Said, M. (2007). *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Harian Waspada.
- Sarundajang, S. H. (2012). *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Sawitri, Isma., Zamzami, Amran., dkk. (1998). *Panitia Peduli Aceh : ” Simak dan Selamatkan Aceh”*. Jakarta: PT Bina Rena Perwira.
- Sebastian, L. (2006). *Realpolitik: Indonesia’s Use of Military Force*: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sihbudi, Riza. (2001). *Bara Dalam Sekam: Identifikasi akan Masalah dan Solusi Atas Konflik- Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*. Bandung: Mizan.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sudirman, A. & Haryanto, N. N. (2018) “*Upaya Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia di Konflik Aceh 2005*” dalam *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 3 hlm. 269–276.
- Sulaiman, Isa, M. (2000). *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka

Utama.

- Stanley. (2000). *Indonesia Di Tengah Transisi*, Jakarta: Propatria.
- Soeharyo. (2016). OTONOMI KHUSUS DI ACEH DAN PAPUA DI TENGAH FENOMENA KORUPSI, SUATU STRATEGI PENINDAKAN HUKUM (Special Autonomy in Aceh and Papua in the Middle of Corruption Phenomenon, A Law Enforcement Strategy). *Jurnal De Jure*. 8(3). Hlm, 305 – 318.
- Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1987. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sweeney, P.D. and McFarlin, D.B. 2002. *Organizational Behavior: Solutions for Management*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Tiro, H. (1984). *The Price Of Freedom: The Unfinished Diary Of Teungku Hasan Di Tiro: National Liberation Front Aceh Sumatera*.
- Ulya. Z (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Konstitusi*. 11(2) hlm 372 – 392.
- Wahyudi, Bambang. (2013). *Resolusi Konflik untuk Aceh (Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.
- Wahyuni, M. dkk (2016). *Sejarah Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Di Aceh 1976-2005*. Jurnal Online Mahasiswa. Vol 3 No. 1.
- Watkins, Peter. (2001). *A Critical Review of Leadership Concepts and Research: The Implication for Educational Administration*. Geelong: Deakin University Press.
- Wiliam, Marsden. (2008). *History of Sumatra (Sejarah Sumatra), Pengantar John Bastin, Terjemah Tim Komunitas Bambu*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Yani. A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. *Lentera Hukum*. 5(2). Hlm. 248 – 258. Doi: 10.19184/ejhl.v5i2.7004.
- Zain, Rakhmad Fadli. (2009). *Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Aceh (Dalam Proses Perdamaian)*. Depok: FISIP UI.
- Zainal, S. (2016). *Transformasi Konflik Aceh Dan relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*. Jurnal Sosiologi, Vol. 21 No. 1 hlm. 81-108.

- Zuhro, R. Siti. (2004), *Konflik dan Kerjasama Antardaerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Zuhro, R. Siti. (2018), *Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Zulkarnain, I. (2008). *Perdamaian Aceh, Analisis Kegagalan CoHA Dan Keberhasilan MoU Helsinki*. Lhokseumawe: Unimal Press.